

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Pranata Media Group, 2009.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2013.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Herman. *Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan Menurut Undang – Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*. Skripsi Sarjana Hukum: UEU, 2011.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. cetak 7. Djambatan, Jakarta, 1997.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: UPT Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Hoff, Jerry. *Undang Undang Kepailitan Indonesia. Penerjemah Kartini Mulyadi, Cet. I*. Jakarta: PT Tatanusa. 2000.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Perdata Sebagai Sumber Hukum Kepailitan Modern*. Majalah Hukum Nasional No. 2, 2000.
- Hartono, Siti Soemarti. *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1993.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lee, A. Weng. *Tinjauan Pasal Demi Pasal FV (Faillissements-Verordening) S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348 Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Medan. 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty 2003.

- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manik, Edward. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nurul Haqim, Auliya. *Uji Insolvensi Terhadap Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Skripsi Sarjana Hukum: UEU 2017.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Octafiani, Leni. *Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. BANK DKI Jakarta Pusat*. Skripsi Sarjana Hukum: UEU, 2011.
- Prasetya, Rudhi. *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996.
- Shubhan, Hadi M. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Slamet, Sri Redjeki. *Materi Perkuliahan Hukum Kepailitan*. Jakarta: Universitas Esa Unggul 2016.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Grafiti. 2002.
- Slamet, Sri Redjeki. *Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditor*. Lex Jurnalica, Volume 7. No. 3. 2010.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hak Tanggungan Asas-Asas ,Ketentuan – Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Suatu Kajian Mengenai Undang – Undang Hak Tanggungan, Alumni, Bandung: 1999.

Supromo, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.

Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Slamet, Sri Redjeki. *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*. Forum Ilmiah Volume 13 Nomor 1, Januari 2016.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2000

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Hukum Kepailitan*.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Persero*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Zaki, Andhika Aulia. *Tanggung Jawab Badan Hukum Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Kreditor-Kreditor Yang Utangnya Telah Jatuh Tempo*. Skripsi Sarjana Hukum: UEU, 2018.

Peraturan Perundang – undangan:

Indonesia, *Undang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Indonesia, *Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Indonesia, *Undang Undang tentang Perbankan, UU.No. 7 Tahun 1992*, Lembaran Negara. No. 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara. 3472.

Indonesia, *Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998*, Lembaran Negara. No. 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No. 3790.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 178.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82.

Website:

<https://kbbi.web.id/pailit>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Pailit*. diakses pada tanggal 23 November 2018 pkl 11:39 WIB.

<https://www.hukum-hukum.com/2014/08/mengapa-nilai-hak-tanggungan-jauh.html>. diakses pada 15 Januari 2019, pukul 00:55 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59ed9a0818cb5/jika-bank-melelang-barang-jaminan-di-bawah-harga-pasar> diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 13.30 WIB.

<https://bh4kt1.wordpress.com/2017/01/24/nilai-penjaminan-fidusia-yang-salah-kaprah/>, diakses pada 18 Februari 2019, pukul 13:03 WIB.